

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.M Yunus Wahid, “*Pengantar Hukum Lingkungan*” Jakarta : Prenamedia Group, 2020.
- Andreas Pramudianto, “*Hukum Lingkungan Internasional A-Z*”, Kalimantan Selatan : Ruang karya Bersama, 2023
- Evi Purnama Wati dan Ardiana Hidayah, “*Dinamika Hukum Lingkungan*”, Indramayu : Penerbit Adab, 2022
- Khalisah Hayatuddin, Serlika Apita, “*Hukum Lingkungan*”, Jakarta : Kencana, 2021
- Suryaningsi, Esti Royani, Agustina Wati, dan Umirati, “*Politik Hukum Lingkungan*”, Purwokerto : Amerta Media, 2022.

B. Jurnal Ilmiah

- Ahmad Murni, (2019). *Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Muaro Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).
- Andri G. Wibisana, “*Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoritis Berdasarkan Analisis Ekonomi atas Hukum (Economic Analysis of Law)*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan 47 No. 2 (2017):
- Andri G. Wibisana, “*Instrumen Ekonomi, Command and Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation*”, Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019.
- Aryanto Renaldi Sahala, Fatma Ulfatun Najicha (2022) “*Penerapan Asas Pencemar Membayar*” Jurnal Hukum tora: 8 (2):
- Aprita, S., Mulkan, H., Raspita, D., & Fakhri, M. (2024). “*Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*”. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(1), 209-220.
- Darma, M. E., & Redi, A. (2018). “*Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan*”. Jurnal Hukum Adigama.
- Farah Nur Laily, Fatma Ulfatun Najicha, (2022), “*Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia*”, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum
- Feri Efendi, Ahmad Fauzi, and Alpi Sahari, “*Analisis Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Kepada PT. Kawasan Industri Medan (Persero)*”, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 1, no. 2 (2020)
- Fitri Fatma Wati, “*Pengaturan Asas Tanggung Jawaban Mutlak Atas Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Korporasi*,” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 28, no. 4 (2022)
- Haris Askari, “*Perkembangan Pengolahan Air Limbah*,” Researchgate Publication (2015)

- Irwansyah, “*Jejak Demokrasi Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 21, Nomor 2, Tahun 2019.
- John Kenedi, 2017, “*Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*”, Journal of Law, Vol. 6 No. 1 Tahun 2016.
- Laode M Syarif, Andri G Wibisana, “*Evolusi Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Lingkungan Global*”, Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus, USAID, the United States Government, The Asia Foundation
- Lengkong, F. Y., Pinori, J. J., & Bawole, H. Y. (2025). Efektivitas Aspek Pidana Dalam Upaya Konservasi Lingkungan Hidup Nasional Dalam Menanggulangi Degradasi Lingkungan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 4813-4832.
- Nurwahyuni Nurwahyuni, Siti Sumartini, and Saeful Kholik, ‘*Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern*’, *Jurnal Suara Hukum*, 4.1 (2023).
- Priyatno, D., & Aridhayandi, M. R. (2018). Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 881-889.
- Purwendah, E. K., & Erowati, E. M. (2021). Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 340-355.
- Sigit Riyanto, dkk. 2020, “*Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*”, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada: Yogyakarta
- Saleh, I. N. S. (2022). “*Urgensi Dan Konsep Ideal Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Perwujudan Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*”. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 6, 110-39.
- Sanyoto, “*Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2018.
- Susilo Handoyo, Dan Muhammad Fakhriza, “*Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan*”. Jurnal De Facto, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Shallman, 2016. “*Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia (Kajian UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup)*”, Prosiding Seminar Nasional : Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Siregar, L. (2019). “*Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup*” (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/PTR).
- Suwari Akhmaddhian, “*Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan)*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13 No. 3 September 2013, Purwekerto : FH UNSOED.
- Tumilantouw, U. L., Melo, I. J., & Lombok, L. L. (2025). “*Analisis Hukum Asas Pencemar Membayar Sebagai Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan*”. *At-Tanwir Law Review*, 5(1), 194-216.

Wiraatmaja, W. A. (2022). “*Penerapan Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) terhadap Tingkat Pencemaran Air Akibat Pembuangan Air Limbah Domestik di Kecamatan Ciracas*”, Jakarta Timur.

Zulfahmi Nur, ‘*Rekonstruksi Negara Hukum Dalam Paradigma Hukum Islam Dan Ketatanegaraan Di Indonesia*’, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6.1 (2023).

C. Internet

Jimly Ashidique, Penegakan Hukum,
<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses tanggal 15 November 2019.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H ayat 1
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Pasal 87

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Pengelolaan dan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621).

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup daerah